

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Oleh:

Nandhya Marfiana¹⁾, Lulus Kurniasih¹⁾

E-mail: loez_80@yahoo.com

¹⁾Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This research is related to the issue performance of local government in Indonesia, which needs to be improved after the introduction of regional autonomy. Each of local governments need to establish and manage their own public financial management system. Many factors may affect the financial performance of local government. This study aimed to examine whether the characteristics of the local governments and the results of the audit can improve the financial performance of local government, as measured by the efficiency ratio. By using multiple regression analysis on 94 samples of local government financial report for year 2011, the study was able to prove that the dependence level and government expenditures have positive significant effect on financial performance. Legislative and the audit findings have negative significant effect on financial performance. While the size, wealth, and audit opinions do not affect the financial performance of the government in the island of Java.

Keywords: *Audit findings, audit opinions, characteristics of local governments, financial performance of local government.*

PENDAHULUAN

Awal mula pengalihan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disebabkan karena faktor krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1996-1997 (Azhar, 2008). Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan agar kelak pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan keuangannya sendiri. Minimalisir campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah

yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara-lain; faktor keuangan dan faktor lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2011) menggunakan variabel pengungkapan dari laporan keuangan daerah yang diwakili oleh *revenue*, *expenditure*, pajak, *real estate*, *grant*, *capital*, GDP (*Gross Domestic Product*), sebagai faktor keuangan dan *employment* sebagai faktor lingkungan. Patrick (2007) telah meneliti mengenai karakteristik daerah yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Ia meneliti tentang komponen organisasi yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi inovasi administratif. Variabel yang digunakan untuk memproksikan karakteristik daerah terdiri dari (a) ukuran daerah; (b) *functional differentiation*; (c) umur daerah; dan (d) *intergovernmental revenue*. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto, et al., (2011) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menggunakan variabel ukuran daerah (*size*), jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Status Daerah untuk memproksikan karakteristik pemerintah daerah. Penelitian Mustikarini dan Fitriarsi (2012) menggunakan ukuran daerah (*size*), tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.

Selain karakteristik pemerintah daerah, peneliti menggunakan variabel hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari adanya berbagai macam tindak kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat berupa temuan audit, opini audit maupun kesimpulan audit. Penelitian mengenai hasil audit BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriarsi (2012) yang menggunakan temuan audit BPK dalam menjelaskan hasil audit. Penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) menggunakan opini audit dalam menjelaskan hasil audit BPK. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menggunakan variabel temuan audit BPK dan opini audit BPK dalam memproksikan hasil pemeriksaan audit.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Bastian (2006), yaitu sebagai laporan operasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efisiensi dan efektifitas serta memonitor biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Hamzah, 2008). Penggunaan rasio efisiensi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sumarjo, 2010). Kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin besar.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan proksi total aset, porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, porsi dana alokasi umum terhadap total pendapatan, total belanja daerah, jumlah anggota legislatif. Semakin besar aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan banyaknya jumlah anggota legislatif seharusnya diharapkan akan semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kinerja yang baik dari pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat. (Mustikarini dan Fitriasisari, 2012)

Hasil Pemeriksaan Audit BPK

Setelah laporan keuangan pemerintah daerah telah selesai disusun dan siap untuk diterbitkan kepada publik, maka diperlukan pelaksanaan sebuah audit guna menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut yang dikerjakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Menurut Bastian (2006), audit pada entitas publik berbeda dengan audit pada entitas swasta karena pada entitas publik, dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat nirlaba, audit yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik negara. Jenis pemeriksaan audit BPK terdiri dari: audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigatif (Bastian, 2006).

Penelitian mengenai hasil pemeriksaan audit BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasisari (2012) yang menggunakan temuan audit BPK dalam menjelaskan hasil audit. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap kinerja (Mustikarini dan Fitriasisari, 2012). Serta penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) yang menggunakan opini audit untuk menjelaskan variabel hasil audit. Pendapat audit dapat menjadi suatu tekanan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna menghasilkan kinerja yang baik pula. Gambar 1 menunjukkan kerangka teoritis pada penelitian ini.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan yang besar dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik. Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Hal ini tentu berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawardani, (2012), serta penelitian Mustikarini, dan Fitriasisari (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar ukuran daerah yang dinilai dari semakin besarnya total aset pemerintah daerah, diharapkan akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₁: Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Saragih (2003) dalam Sumarjo (2010) menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif akan mendorong investasi yang juga mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Peningkatan infrastruktur daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik

yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian tentang PAD pernah dilakukan oleh Indrarti (2011) dan Virgasari (2009) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara PAD dengan kinerja keuangan daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar total PAD maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₂: Tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat *Block Grant* yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Indararti (2011) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi antara DAU dengan kinerja keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian Virgasari (2009) yang menyimpulkan bahwa DAU memiliki korelasi yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₃: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Penelitian Mustikarini, dan Fitriarsari (2012) menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₄: Belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kusumawardani (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara logika semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan dalam bekerja. Tingkat kemauan dalam bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah. Sumarjo (2010) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang akhirnya terbentuk titik temu bahwa semakin besar anggota legislatif maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah atau sebaliknya. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₅: Ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit BPK yaitu berupa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Penelitian yang menghubungkan temuan audit dengan kinerja pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriastari (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₆: Temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

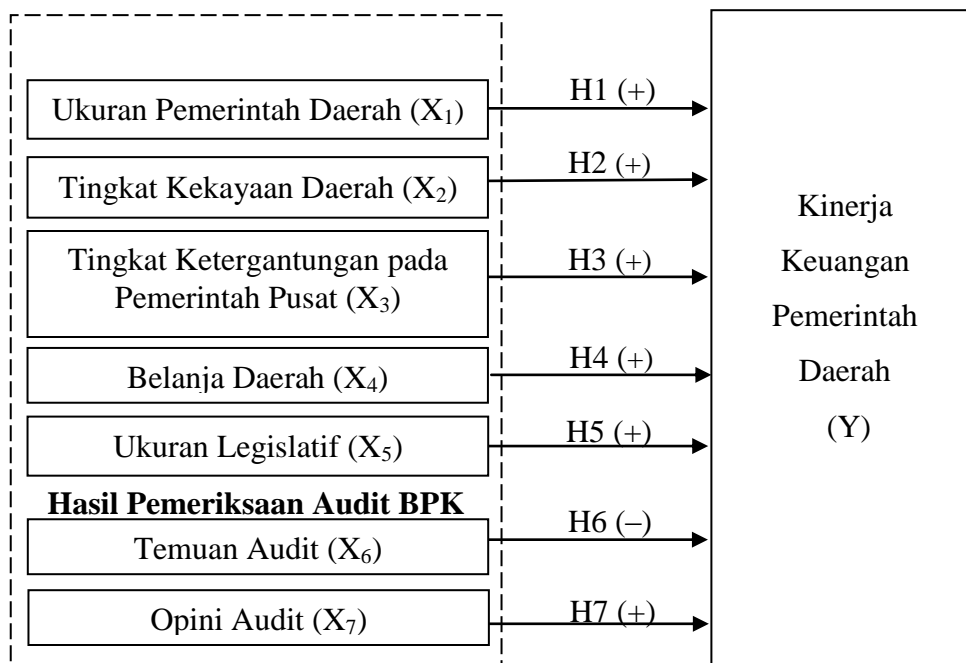
Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin wajar opini audit BPK maka seharusnya menunjukkan semakin tingginya kinerja suatu pemerintah daerah. Penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₇: Opini Audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Gambar 1. Kerangka Teoritis

Variabel Independen

Variabel Dependen



PEMBAHASAN

Model Penelitian dan Definisi Operasional

Model penelitian ini adalah:

$$KNJ_{it} = \alpha + \beta_1 TA_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 BD_{it} + \beta_5 DPRD_{it} - \beta_6 TEMUAN_{it} + \beta_7 OPINI_{it}$$

Keterangan:

α = Konstan

β_1, \dots, β_7 = Koefisien variabel independen

= Error

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Subvariabel/ Dimensi	Indikator
Independen (X): Karakteristik Pemerintah Daerah	X1: Ukuran Pemerintah Daerah	Total Aset Pemerintah Daerah
	X2: Tingkat Kekayaan Daerah	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah
	X3: Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	Total Dana Alokasi Umum (DAU) Total Pendapatan Daerah
	X4: Belanja Daerah	Total Realisasi Belanja Daerah
	X5: Ukuran Legislatif	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Hasil Pemeriksaan Audit Audit BPK	X6: Temuan Audit BPK	Temuan audit (dalam rupiah)
	X7: Opini Audit BPK	Opini Audit
Dependen (Y): Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		Realisasi Pengeluaran (<i>output</i>) terhadap Realisasi Penerimaan (<i>input</i>)

Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah yang diukur dari dengan tingkat efisiensi. Dengan kriteria presentase kinerja sebagai berikut: 100% ke atas tidak efisien; 90% – 100% kurang efisien; 80% – 90% cukup efisien; 60% – 80% efisien; dan di bawah 60% sangat efisien. (Bisma, 2010). Definisi operasional masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam tabel 1.

Sampel dan Data

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan cara *purposive sampling*, yang berarti sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran dan Bougie, 2010). Kriteria tersebut yaitu: sampel adalah pemerintah daerah kabupaten/kota Pulau Jawa yang memiliki semua data laporan keuangan yang lengkap meliputi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit oleh BPK; sampel memiliki data laporan hasil pemeriksaan audit BPK tahun 2011 untuk mendapatkan jumlah temuan audit dan opini audit yang diambil dari Ikhtisar Pemeriksaan semester 1 dan 2 tahun 2012 pada situs resmi BPK (<http://www.bpk.go.id>); dan sampel yang terdapat data-data non-keuangan seperti jumlah anggota legislatif, yang didapatkan dari situs resmi masing-masing pemerintah daerah. Dari 112 sampel yang dipilih hanya 94 sampel yang dapat digunakan dan memenuhi kriteria di atas.

Deskripsi Statistik

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki rata-rata sebesar 0,9158. Nilai rata-rata sebesar 0,9158 berarti secara rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah masih kurang efisien. Dari rata-rata tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membelanjakan dana yang ada pada anggaran dan masih buruknya tingkat pelayanan publik. Berdasarkan sampel pada penelitian ini didapatkan 69 pemerintah daerah yang memiliki kinerja kurang efisien sedangkan 25 pemerintah daerah memiliki kinerja cukup efisien. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja tertinggi adalah Kota Tangerang dengan tingkat efisiensi sebesar 0,8227 yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Tangerang sudah mampu untuk

mengalokasikan anggaran yang ada untuk digunakan dengan semestinya, serta sudah baiknya tingkat pelayanan publik yang diberikan.

Opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau Jawa rata-rata memiliki opini Wajar dengan pengecualian. Tingkat opini tertinggi sebesar 5 atau dengan opini Wajar tanpa pengecualian dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kota Banjar, Kota Tegal, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Surakarta. Sedangkan tingkat opini terendah sebesar 1 atau dengan opini Tidak menyatakan pendapat dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Min	Max	Std.Deviasi
Kinerja	0,9158	0,82	0,99	0,03191
Ln_TA	7,7881	6,48	8,99	0,46553
PAD	0,1119	0,03	0,30	0,06181
DAU	0,5180	0,05	0,65	0,8904
Ln_BD	6,9833	6,02	8,08	0,38280
DPRD	45,10	22	63	7,727
Ln_Temuan	0,2943	-6,91	4,31	1,68714
Opini	3,29	1	5	0,682

Sumber: data sekunder diolah, 2013

Pengujian Model Penelitian

Peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui kenormalan sebaran data dalam penelitian. Hasil menunjukkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, maupun autokorelasi.

Pada uji koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adjusted R²* sebesar 22,6% berarti mengindikasikan bahwa variabel indepenen yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari total aset, PAD, DAU, realisasi belanja daerah, ukuran legislatif, temuan audit, dan opini audit mampu menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 22,6%. Sementara sisanya 77,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini. Sedangkan pada uji signifikansi simultan (uji statistik F) didapatkan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut <0,05 maka hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil olah data, dapat dilihat bahwa variabel total aset, PAD, dan opini audit memiliki nilai signifikansi >0,10. Oleh karena itu untuk ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel

DAU, belanja daerah, DPRD, dan temuan audit memiliki nilai signifikansi $<0,10$ sehingga berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset. Berdasarkan pengujian uji regresi berganda maka dapat terlihat bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Kusumawardani (2012), Sumardjo (2010), Mustikarini dan Fitriasaki (2012). Hal ini mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan menggunakan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan pengujian uji regresi berganda dapat terlihat bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peran PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi dengan semestinya (Sumardjo, 2010). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012), namun hal ini dapat diterima karena mengingat besarnya porsi ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia terhadap transfer dana dari pemerintah pusat (Hadi, et.al., 2009).

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang diproksikan dengan porsi DAU dalam total realisasi pendapatan daerah sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maka semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Sumarjo (2010).

Untuk variabel belanja daerah, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja daerah pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik.

Ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai dengan hipotesis awal dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian uji regresi berganda didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara jumlah anggota DPRD dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah anggota DPRD belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Bahkan malah semakin menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Peran yang diharapkan pada anggota DPRD dalam kaitannya dengan kinerja yaitu dalam hal pengawasan pelaksanaan kinerja oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Seharusnya DPRD diharapkan dapat lebih sensitif dan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat mengingat mereka pun terpilih menjadi anggota DPRD karena pilihan masyarakat. Kurangnya peran anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat kita lihat dengan maraknya berita buruk seperti banyaknya anggota DPRD kabupaten maupun kota yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Sumarjo, 2010).

Untuk variabel temuan audit berhasil membuktikan hipotesis penelitian yaitu bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besarnya jumlah temuan audit oleh BPK pada suatu laporan keuangan pemerintah daerah maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh antara opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Virgasari (2009) yang menunjukkan korelasi antara opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah dengan kinerja keuangan mendekati angka 0. Hubungan antara kedua variabel dalam penelitian ini tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indrarti (2011) yang juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Penyebab tidak adanya korelasi ini disebabkan karena dalam pemberian opini audit, BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal, pemeriksaan akun-akun, dan catatan akuntansi (Indrarti, 2011). Tujuan pemeriksaan tersebut berguna untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan (*fraud*) dalam pencatatan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan bukan berdasarkan jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut (Indrarti, 2011).

Tabel 3. Hasil Uji Regresi sebelum Variabel *Dummy* dimasukkan

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi
Konstanta	0,798	8,630	0,000
Ln_TA	-0,011	-1,128	0,262
PAD	-0,023	-0,331	0,742
DAU	0,144	3,110	0,003*
Ln_BD	0,030	1,687	0,095***
DPRD	-0,001	-1,755	0,083***
Ln_Temuan	-0,004	-2,142	0,035**
Opini	-0,007	-1,465	0,147

Sumber: data sekunder diolah, 2013

* signifikan pada $\alpha = 1\%$

** signifikan pada $\alpha = 5\%$

*** signifikan pada $\alpha = 10\%$

Pengujian Tambahan

Sebagai pengujian tambahan, akan diuji apakah tipe pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja. Tipe pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota. Variabel *dummy* digunakan, yaitu PemKab diberi kode 0, sedangkan PemKot diberi kode 1. Kabupaten dan kota memiliki beberapa perbedaan karakteristik di antaranya:

- Dari aspek luas wilayah: wilayah pemerintahan daerah kabupaten relatif lebih luas daripada wilayah pemerintah daerah kota. Sehingga di wilayah kabupaten banyak terdapat desa-desa tertinggal, sementara untuk menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dibutuhkan anggaran yang lebih besar.
- Dari aspek kependudukan: kepadatan penduduk di wilayah pemerintah kabupaten lebih rendah daripada kepadatan penduduk di wilayah pemerintah kota. Sehingga akan menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan masalah-masalah sosial lainnya.
- Dari aspek perekonomian: rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pemerintah daerah kabupaten lebih rendah daripada PDRB pemerintah daerah kota (Halim, 2001). Hal ini berimplikasi pada proporsi sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat

dipunggut oleh pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan (*income*) di kota juga lebih besar daripada kabupaten (Prud'homme, 1995).

Setelah dilakukan kembali uji regresi berganda untuk variabel *dummy* ini, maka didapatkan hasil bahwa variabel *dummy* tipe pemerintah daerah berpengaruh positif secara signifikan pada signifikansi 5% dengan *p-value* sebesar 0,044. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah kota memiliki perbedaan signifikan.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi setelah Variabel *Dummy* dimasukkan

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi
Konstanta	0,720	7,311	0,000
Ln_TA	-0,014	-1,461	0,148
PAD	-0,104	-1,303	0,196
DAU	0,158	3,431	0,001
Ln_BD	0,042	2,257	0,027
DPRD	0,000	-1,165	0,247
Ln_Temuan	-0,004	-1,959	0,053
Opini	-0,007	-1,634	0,106
Tipe_PemDa	0,025	2,043	0,044

Sumber: data sekunder diolah, 2013

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan dan Implikasi

Penelitian ini menguji secara karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kesimpulan: Ukuran pemerintah daerah; tingkat kekayaan daerah; dan opini audit **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah **berpengaruh positif signifikan** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit **berpengaruh negatif signifikan** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Kesimpulan tersebut memberikan implikasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa bahwa:

1. Pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan (PAD) yang besar seharusnya mampu memberikan kinerja yang baik. Jika pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar namun kinerja efisiensinya dinilai masih buruk maka pemerintah daerah tersebut harus instropeksi dan melakukan perbaikan ke depannya. Karena logikanya pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar pasti memiliki tekanan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk lebih baik dalam mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya itu guna perbaikan kinerja.
2. Pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat rata-rata masih memiliki persentase yang sangat besar. Hasil ini seharusnya mampu menjadikan suatu tekanan bagi pemerintah daerah bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan mereka akan selalu diawasi oleh pemerintah pusat sehingga mampu memberikan kinerja yang baik pula.

3. Pemerintah daerah dengan total belanja yang besar seharusnya mampu memberikan kinerja yang baik. Karena belanja daerah baik itu yang sifatnya rutin maupun belanja modal dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah daerah tentunya dituntut harus mampu untuk mengelola pengeluaran-pengeluaran yang dapat meningkatkan kinerjanya kepada publik.
4. Pemerintah daerah dengan ukuran legislatif yang banyak seharusnya mampu meningkatkan kinerjanya. Jika pemerintah daerah dengan anggota DPRD yang banyak namun kinerjanya semakin menurun, maka pemerintah daerah tersebut harus melakukan evaluasi terhadap para jajaran legislatifnya guna melakukan perbaikan kinerja ke depannya.
5. Hasil pemeriksaan audit BPK terkait temuan audit menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih mawas diri dalam mengelola keuangan daerahnya karena buruknya kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan mempengaruhi akan kinerja keuangan daerah. Sedangkan opini audit belum cukup untuk menjelaskan keterkaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit suatu pemerintah daerah yang baik belum tentu menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut akan baik pula.

Keterbatasan dan Saran

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya bisa menjelaskan 22,6% variabel dependen. Sehingga sisanya sebanyak 77,4% dapat dijelaskan dengan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit yang lebih beragam. Misalnya dengan memasukkan variabel tingkat pertumbuhan, *leverage*, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Serta penggunaan pengukuran temuan audit yang lebih luas misalnya jumlah kasus yang dalam temuan audit atas SPI.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah di Pulau Jawa sebagai sampel penelitian dan hanya menggunakan tahun anggaran 2011. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak sampel pemerintah daerah sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan data yang lebih signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012*. <http://www/bpk.go.id> diakses pada 26 Mei 2013.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2012*. <http://www/bpk.go.id> diakses pada 26 Mei 2013.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bisma, I Dewa Gde., Susanto, Hery. 2010. 'Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal GaneC Swara Edisi Khusus Vol.4 No.3*, Desember. Universitas Mataram.

- Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. *Laporan Realisasi APBD 2011*. www.djpk.depkeu.go.id diakses pada 21 Juni 2013.
- Hadi, Abdul, Hendri, Sapto, dan Inapty, Biana Adha. 2009. *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Hamzah, Ardi. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*. Jurnal. Universitas Trunojoyo Madura.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. *Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Jurnal. Universitas Riau.
- Kusumawardani, Media. 2012. 'Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia'. *Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.
- Mustikarini, Widya Astuti., Fitriasari, Debby. 2012. 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007'. *Simposium Nasional Akuntansi XV*: Banjarmasin.
- Ningsih, Ayu Tutia. 2011. *Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Prud'homme, Remy. 1995. 'The Dangers of Decentralization'. *The World Bank Research Observer 10*(2): 201-220.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business-A Skill Building Approach-5th Edition*. United Kingdom: John Wiley&Sons Ltd.
- Suhardjanto, Djoko., Rusmin, Mandasari., Putriesti., dan Brown, Alistair. 2010. 'Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities'. *Journal Public Policy January 2010*
- Suhardjanto, Djoko., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No.1/November 20011: 1-194*.

- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tim, Wahana Komputer. 2009. *Panduan Praktis: SPSS 17 untuk Pengolahan Data Statistik..* Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Virgasari, Aviva. 2009. *Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Bank	No.	Nama Bank
1	PT Bank Antardaerah	16	PT Bank Bukopin, Tbk.
2	PT Bank Ganesha	17	PT Bank negara indonesia, Tbk.
3	PT Bank Hana	18	PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
4	PT Bank SBI Indonesia	19	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
5	PT Bank UOB Indonesia	20	PT Bank Danamon, Tbk.
6	PT Bank Harda Internasional	21	PT Bank Mandiri, Tbk
7	PT Bank Ina Perdana	22	PT Bank Bumi Arta, Tbk.
8	PT Bank Jasa Jakarta	23	PT Bank International Indonesia, Tbk.
9	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	24	PT Bank Permata, Tbk.
10	PT Bank Commonwealth	25	PT Bank Swadesi, Tbk.
11	PT OCBC - Indonesia	26	PT Bank Victoria International, Tbk.
12	PT Rabobank International Indonesia	27	PT Bank Mayapada, Tbk.
13	PT Resona Perdania	28	PT Bank Mega, Tbk.
14	PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.	29	PT Bank Pan Indonesia (Panin Bank), Tbk.
15	PT Bank Central Asia, Tbk.	30	PT Bank Himpunan Saudara, Tbk.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SF	145	630964	551891704	64047231.00	1.117E8
NWC	145	-.2530	.3800	.152746	.0759822
ROA	145	-.0164	.0614	.019459	.0125731
ROE	145	-.1896	.4383	.137253	.0961640
CAR	145	.1047	.4377	.183534	.0603975
NPL	145	.0014	.0820	.021888	.0158814
SBD	145	.0534	.1250	.081548	.0137460
SBK	145	.0532	.2668	.141919	.0322008
LIKUIDITAS	145	.0535	.2909	.119482	.0429700
Valid N (listwise)	145				

Tabel 4.2
Hasil Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00002
Cases < Test Value	72
Cases >= Test Value	73
Total Cases	145
Number of Runs	72
Z	-.249
Asymp. Sig. (2-tailed)	.803

a. Median

Tabel 4.3
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.094	.026		3.545	.001		
LnSIZE	-.001	.001	-.056	-.984	.327	.447	2.237
NWC	.072	.026	.128	2.777	.006	.691	1.447
ROA	1.523	.302	.446	5.050	.000	.188	5.317
ROE	-.195	.043	-.436	-4.541	.000	.159	6.296
CAR	.483	.038	.679	12.740	.000	.515	1.941
NPL	.122	.124	.045	.988	.325	.702	1.424
SBD	-.538	.137	-.172	-3.926	.000	.762	1.312
SBK	-.101	.058	-.076	-1.740	.084	.766	1.305

a. Dependent Variable: LIKUIDITAS

Tabel 4.4
Hasil Uji ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.213	8	.027	68.370	.000 ^a
	Residual	.053	136	.000		
	Total	.266	144			

a. Predictors: (Constant), SBK, CAR, ROA, NWC, SBD, NPL, LnSIZE, ROE

b. Dependent Variable: LIKUIDITAS

Tabel 4.5
Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 ^a	.801	.789	.0197310	2.225

a. Predictors: (Constant), SBK, CAR, ROA, NWC, SBD, NPL, LnSIZE, ROE

b. Dependent Variable: LIKUIDITAS